

Perencanaan Dana Pensiun Dan Pendidikan Berbasis Syariah: Pendekatan Strategi Untuk Kesejahteraan Masa Depan

¹Nadiah Ulfatun Hasanah

²Rini Puji Astuti

³Indana Zulfa Azizah

Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember
Jl. Mataram No.1, Karang Miuwo, Mangli, Kec. Kaliwates, Kabupaten
Jember, Jawa Timur

Korespondensi penulis: nadiahulfa30@gmail.com, rinipuji.astuti111983@gmail.com,
izulfaazizah@gmail.com

Abstrak. Retirement and education planning is an important part of family financial management that aims to achieve sustainable prosperity in the future. From an Islamic perspective, financial planning should be done in compliance with sharia principles that prohibit riba, maysir and gharar. The sharia approach in financial planning includes the use of halal instruments such as sharia insurance (takaful), sukuk, and investment in sharia mutual funds that comply with the fatwa of the National Sharia Council⁽¹⁾. This planning also emphasizes the importance of the values of responsibility, justice, and the blessing of wealth in meeting long-term needs such as children's education funds and family pension funds⁽²⁾. This study shows that good Islamic financial literacy can encourage Muslim communities to plan their future more strategically⁽³⁾. Therefore, strengthening the Islamic financial ecosystem and educating the public are crucial steps in supporting Islamic values-based financial well-being.

Keywords: Education fund; Islamic finance; Pension fund; Strategic planning; Welfare

Abstrak. Perencanaan dana pensiun dan pendidikan merupakan bagian penting dari manajemen keuangan keluarga yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan berkelanjutan di masa depan. Dalam perspektif Islam, perencanaan keuangan harus dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah yang melarang unsur riba, maysir, dan gharar. Pendekatan syariah dalam perencanaan keuangan mencakup penggunaan instrumen halal seperti asuransi syariah (takaful), sukuk, dan investasi pada reksa dana syariah yang sesuai dengan fatwa dewan syariah nasional. Perencanaan ini juga menekankan pentingnya nilai tanggung jawab, keadilan, dan keberkahan harta dalam memenuhi kebutuhan jangka panjang seperti dana pendidikan anak dan dana pensiun keluarga. Kajian ini menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah yang baik dapat mendorong masyarakat muslim untuk merancang masa depan secara lebih strategis dan terencana. Oleh karena itu, penguatan ekosistem keuangan syariah dan edukasi masyarakat menjadi langkah krusial dalam mendukung kesejahteraan finansial berbasis nilai-nilai Islam.

Kata Kunci: Dana Pendidikan; Dana Pensiun; Keuangan syariah; Kesejahteraan; Perencanaan Strategis

PENDAHULUAN

Setiap orang memerlukan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga, baik saat masih bekerja maupun setelah pensiun. Di masa tua, ketika seseorang tidak lagi aktif secara ekonomi, kebutuhan hidup tetap ada dan bahkan bisa meningkat karena faktor kesehatan dan ketergantungan. Oleh karena itu, merencanakan dana pensiun menjadi langkah penting untuk menjamin kesejahteraan di masa tersebut. Salah satu cara yang umum digunakan adalah melalui program dana pensiun. Kebiasaan menabung sejak muda mencerminkan kesadaran finansial yang baik. Individu usia 26-35 tahun cenderung lebih siap secara mental dan keuangan menghadapi masa pensiun karena masih memiliki waktu panjang untuk merencanakan. Dana pensiun dikelola oleh lembaga khusus dan disalurkan kembali dalam bentuk manfaat pensiun sesuai ketentuan. Pengelolaan dana pensiun yang profesional menjadi kunci keberlanjutan manfaat peserta, termasuk penerapan tata kelola yang baik, strategi investasi aman, dan keterbukaan pelaporan. Selain itu literasi keuangan individu juga penting dalam perencanaan pensiun. Dana pensiun bukan hanya soal jumlah, tapi juga upaya menciptakan masa tua yang mandiri sejahtera, dan bebas keuangan.

Pembiayaan merupakan aspek penting dalam mendukung kelangsungan dan kualitas pendidikan. Tanpa dukungan dana yang memadai, proses pendidikan sulit berjalan optimal. Pembiayaan mencakup seluruh kebutuhan biaya yang menunjang kelangsungan kegiatan pendidikan, termasuk untuk pengajaran, sarana, serta aktivitas penunjang lainnya. Dalam sistem pendidikan, khususnya di lembaga non-profit, pembiayaan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti beban mengajar, ketersediaan media pembelajaran, buku ajar, serta fasilitas pendukung lainnya. Pembiayaan pendidikan tidak hanya berperan dalam menjaga kelangsungan program pendidikan, tetapi juga berpengaruh terhadap mutu lulusan yang dihasilkan. Semakin baik sistem pembiayaannya, semakin besar peluang bagi lembaga pendidikan untuk memberikan layanan yang berkualitas. Namun, pada kenyataannya, tidak semua lembaga mampu memenuhi kebutuhan dananya hanya dari bantuan pemerintah. Selain dana dari pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang dengan alokasi minimal 20% dari APBN/APBD, sumber perdanaan juga bisa berasal dari masyarakatan melalui zakat, wakaf, hibah, dan sumbangan lain yang sah secara syariah. Pengelolaan dana yang efektif dan sesuai prinsip Islam sangat penting untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata.

KAJIAN TEORI

Perencanaan keuangan dalam perspektif Islam merupakan bagian integral dari pengelolaan hidup yang bertujuan untuk meraih keberkahan serta kesejahteraan di dunia dan akhirat. Dasar pijakannya meliputi larangan terhadap praktik riba, perjudian (maysir), dan ketidakpastian (gharar), di samping itu Islam menganjurkan untuk memanfaatkan instrumen keuangan yang halal seperti takaful, sukuk, dan reksa dana syariah.

Sejalan dengan hal itu, perencanaan dana pensiun dan pembiayaan pendidikan menjadi dua elemen krusial yang perlu disusun dengan pendekatan strategis yang selaras dengan nilai-nilai syariah. Adapun dana pensiun merupakan bagian dari perencanaan keuangan jangka panjang yang dirancang untuk memastikan kesejahteraan individu di masa tua. Menurut berbagai penelitiann mengungkapkan bahwa usia produktif, terutama rentang 26–35 tahun, adalah periode

yang ideal untuk mulai menyusun rencana pensiun, karena pada fase ini individu umumnya memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengatur keuangan dan mengelola waktu.

Di samping itu, pengelolaan dana pensiun secara optimal perlu memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola berbasis syariah, seperti transparansi, kehati-hatian dalam berinvestasi, serta kepatuhan terhadap ketentuan syariah. Di sisi lain, pendanaan pendidikan merupakan aspek mendasar dalam menjaga kualitas dan keberlanjutan proses pendidikan. Dalam pandangan Islam, tanggung jawab utama pembiayaan pendidikan berada di tangan negara, namun pelaksanaannya juga dapat diperkuat melalui kontribusi masyarakat, seperti melalui zakat, wakaf, dan hibah. Negara berkewajiban menyediakan layanan pendidikan secara cuma-cuma, sebagaimana telah diterapkan dalam sistem khilafah Islam sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pokok umat.

Skema pembiayaan ini mencakup dua kategori, yakni biaya langsung seperti operasional sekolah dan biaya tidak langsung seperti kebutuhan hidup peserta didik, yang keduanya harus dikelola berdasarkan asas keadilan dan efisiensi. Secara umum, baik perencanaan dana pensiun maupun pembiayaan pendidikan berbasis syariah memegang peranan penting dalam mewujudkan masa depan yang mandiri dan berkelanjutan. Kedua aspek ini menuntut adanya pemahaman yang kuat terhadap literasi keuangan Islam, dukungan dari sistem keuangan syariah yang komprehensif, serta kolaborasi yang solid antara individu, institusi, dan pemerintah dalam rangka membangun kesejahteraan yang dilandasi oleh prinsip-prinsip Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, yang mencakup tujuan untuk menggambarkan secara mendalam fenomena perencanaan dana pensiun dan pembiayaan pendidikan berbasis syariah. Penelitian ini tidak bertujuan menguji hipotesis melainkan mengeksplorasi makna dan peraktek yang terjadi dalam masyarakat serta lembaga terkait. Pendekatan yang digunakan studi kasus dan fenomenologi agar dapat memahami praktek lembaga serta pengalaman individu usia 26-35 tahun dalam merencanakan keuangan masa depan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dana Pensiun

Terlepas dari status pekerjaannya, setiap orang membutuhkan sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarganya. Pada usia lanjut, ketika seseorang sudah pensiun dan biaya hidup meningkat, mereka mungkin akan menghadapi biaya tak terduga (Rizqi et al., 2023). Oleh karena itu, berpartisipasi dalam program pensiun adalah salah satu metode yang paling efisien untuk mempersiapkan potensi pendapatan setelah pensiun.

Dana pensiun adalah praktik yang dilakukan oleh seseorang untuk mengalokasikan sebagian dana untuk keamanan finansial di masa depan. Perencanaan pensiun melibatkan perilaku atau tindakan untuk mengelola uang pensiun. Orang dewasa yang lebih muda, terutama mereka yang berusia 26 hingga 35 tahun, lebih cenderung mengadopsi sikap positif dan perilaku proaktif terhadap tabungan pensiun dini karena meningkatnya waktu luang untuk persiapan pensiun (M. Arfan H, 2020). Individu yang lebih muda memiliki ketersediaan yang lebih besar untuk didedikasikan untuk perencanaan pensiun.

Dana pensiun adalah kumpulan aset yang dikelola oleh suatu lembaga untuk menghasilkan manfaat pensiun. Manfaat pensiun adalah pembayaran terjadwal yang dibayarkan kepada peserta pada waktu yang telah ditentukan, yang diatur oleh peraturan program pensiun. Pencairan manfaat bergantung pada usia tertentu. Jasmine dan Yazid (2023) menegaskan bahwa tujuan dari program dana pensiun ini adalah untuk memberikan manfaat kepada karyawan perusahaan, khususnya yang mencapai usia yang ditetapkan untuk pensiun sesuai dengan perjanjian.

Lebih lanjut, hasil analisis data menunjukkan bahwa pengelolaan dana pensiun yang efektif dan efisien sangat penting untuk memastikan kesejahteraan finansial peserta di masa pensiun. Faktor-faktor kunci yang perlu dipertimbangkan dalam pengelolaan dana pensiun mencakup tata kelola dan pengendalian internal, perumusan strategi investasi yang sesuai, pelaksanaan sistem manajemen risiko yang komprehensif, kepatuhan terhadap peraturan, transparansi dan pelaporan yang memadai, serta pengawasan dan audit yang ketat (Rusmini et al., 2024). Selain itu, indikator dalam pengambilan keputusan investasi, seperti pemilihan instrumen berisiko rendah, merupakan bagian dari perencanaan keuangan jangka panjang. Dalam konteks ini, perilaku keuangan menjadi sangat penting karena mencakup kemampuan individu untuk menetapkan tujuan keuangan, merumuskan strategi, mengelola aset, dan membuat keputusan investasi yang tepat. (Sony et al., 2024) Studi menunjukkan bahwa orang dengan disposisi positif terhadap manajemen keuangan lebih cenderung menunjukkan perilaku yang terkonsentrasi dalam persiapan investasi, sehingga meningkatkan prospek mereka untuk stabilitas keuangan di masa depan.

Rencana pensiun adalah strategi yang harus dirancang sejak dini untuk memastikan kehidupan yang sejahtera di masa tua. Menilai keadaan keuangan seseorang adalah strategi untuk mempersiapkan masa pensiun. Persepsi seseorang terhadap uang dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk mengatur perilaku mereka ketika dihadapkan pada keadaan keuangan yang beragam. Jika seseorang memiliki pola pikir keuangan, mereka akan lebih siap untuk membuat berbagai keputusan terkait pengelolaan sumber daya keuangan mereka. Pinky (2023) menegaskan bahwa seseorang dengan sikap keuangan yang memuaskan menunjukkan pola pikir positif tentang uang dan perspektif optimis tentang keadaan keuangan mereka di masa depan.

Tujuan utama dari mempertahankan dana pensiun yang cukup adalah untuk memastikan kemandirian finansial di tahun-tahun berikutnya. Kita bisa membayangkan implikasi jika kita tidak lagi memiliki penghasilan bulanan yang dapat diandalkan setelah mencapai usia pensiun. Sebaliknya, ketika anak-anak kita sudah berkeluarga, mereka secara inheren berfokus pada dimensi finansial dari tagihan rumah tangga mereka, yang mencakup banyak kebutuhan. Selain itu, beberapa bahaya yang mungkin akan menghadang ketika kita memasuki usia senja. Dana pensiun adalah instrumen tabungan yang sangat penting untuk masa tua seseorang. Banyak orang bercita-cita untuk mencapai kehidupan yang aman dan sukses ketika mencapai usia pensiun. (Sugi dkk., 2022).

B. Konsep Pembiayaan Pendidikan Syariah

Pembiayaan adalah elemen penting yang penting untuk pelaksanaan pendidikan (Gammar, 2019). Pendidikan, sebagai sebuah sistem yang kompleks, membutuhkan sumber daya keuangan yang signifikan, dan semua komponen yang mendukung operasi dan

keberlanjutan yang efektif harus dipertimbangkan. Semua aspek dapat dicapai melalui dukungan finansial.

Dari perspektif Islam, tanggung jawab untuk membiayai pendidikan terletak pada negara untuk memastikan kesejahteraan kolektif masyarakat. Semua komponen pendidikan, termasuk kompensasi guru dan penyediaan sarana dan prasarana, harus dibiayai oleh negara untuk menjamin akses masyarakat terhadap pendidikan gratis. Perspektif ini sejalan dengan gagasan bahwa negara memikul tanggung jawab langsung untuk memenuhi tiga kebutuhan masyarakat yang esensial, terutama pendidikan. Layanan kesehatan dan keamanan adalah komponen penting dari infrastruktur kesehatan masyarakat. Hal ini berbeda dengan kebutuhan pribadi seperti sandang, pangan, dan papan, yang secara tidak langsung dijamin oleh negara (Suningsis et al., 2022).

Pembiayaan pendidikan berfungsi sebagai sumber daya keuangan yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan sangat penting untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan program pendidikan dan merupakan aspek fundamental dalam manajemen pendidikan. Pembiayaan pendidikan melibatkan distribusi pendapatan dan sumber daya yang tersedia untuk merancang dan melaksanakan program kegiatan sekolah. Lembaga pendidikan nirlaba di sektor pendidikan menghadapi faktor penentu biaya termasuk jumlah jam pelajaran yang disampaikan oleh pendidik, materi pembelajaran, buku pelajaran yang digunakan, dan fasilitas tambahan sementara. Program pendidikan yang ditawarkan oleh sekolah dapat meningkatkan keterampilan lulusan, yang berpotensi mempengaruhi biaya pendidikan (Rojii et al., 2020).

Sumber Pembiayaan dalam Standar Pembiayaan Pendidikan Agama Islam

Lembaga pendidikan di Indonesia beragam dalam jenis, pengelolaan, dan sumber pembiayaan. Ada yang di biayai penuh oleh pemerintah (negeri), ada pula yang dikelola swasta dengan pembiayaan utama dari pihak swasta. Namun, bantuan pemerintah sering kali belum mencukupi, bahkan untuk sekolah negeri, yang masih banyak kekurangan sarana. Lembaga swasta pun harus berupaya mandiri dalam memenuhi kebutuhan, sehingga lembaga pendidikan tidak bisa sepenuhnya mengandalkan pemerintah (Arif, 2022).

Pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 mengatur tentang pembiayaan pendidikan. Undang-undang ini menetapkan masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat sebagai sumber bantuan keuangan. Pemerintah pusat mengalokasikan dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan menetapkan kontribusi minimum dua puluh persen untuk pengeluaran pendidikan. Kontribusi ini tidak termasuk remunerasi untuk pendidik dan pengeluaran pendidikan formal. Pemerintah daerah mengalokasikan minimal dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk sektor pendidikan. Pemerintah daerah ini mencakup lembaga-lembaga pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Masyarakat memberikan dukungan melalui bantuan pendidikan, yang meliputi hibah, wakaf, zakat, pinjaman, sumbangan, kontribusi perusahaan, keringanan pajak, dan pembebasan biaya pendidikan, serta sumber pendapatan lain yang sah dan halal (Ridwan, 2022).

Jenis Pembiayaan Pendidikan Syariah

Jenis pembiayaan dalam pendidikan syariah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung merupakan pengeluaran yang di tanggung dalam menyelenggarakan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara langsung dalam proses pendidikan. Sementara itu, Biaya tidak langsung adalah biaya hidup yang di tanggung oleh keluarga atau peserta didik, dan tidak digunakan secara langsung oleh lembaga pendidikan. Biaya hidup ini tetap menjaga kelancaran proses pendidikan dan dikenal sebagai biaya tidak langsung. Contohnya adalah biaya perjalanan, perumahan, makan sehari-hari, perawatan kesehatan, dan studi tambahan (Khafidhoh, 2024).

KESIMPULAN

Dana pensiun merupakan bentuk perencanaan keuangan jangka panjang yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan dan menunjukkan bahwa keuangan yang matang, baik dalam bentuk dana pensiun maupun pembiayaan pendidikan, sangat penting untuk memastikan kesejahteraan di masa depan. Dalam konteks dana pensiun, penting bagi individu untuk mulai merencanakan sejak dini agar memiliki dana yang cukup saat memasuki masa pensiun, mengingat kebutuhan hidup yang tetap ada meskipun sudah tidak lagi bekerja. Selain itu, pengelolaan dana pensiun yang efektif dan efisien, dengan fokus pada pengendalian risiko dan transparansi, akan menjamin stabilitas keuangan bagi pesertanya di usia tua. Sementara itu, dalam dunia pendidikan, pembiayaan memegang peranan penting, dengan tanggung jawab yang tidak hanya berada di tangan pemerintah, tetapi juga masyarakat dan sektor swasta. Pembiayaan ini mencakup biaya langsung dan tidak langsung yang mendukung kelancaran proses pendidikan. Dalam persepektif syariah, pembiayaan pendidikan harus dikelola sesuai prinsip islam, dengan memastikan sumber dana halal dan tidak memberatkan pihak manapun. Secara keseluruhan, baik dana pensiun maupun pembiayaan pendidikan memerlukan perencanaan yang cermat dan partisipasi dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan kesejahteraan dan kelangsungan hidup yang lebih baik bagi individu dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Mursalina, R., & dkk. (2023). Analisi Pentingnya Dana Pensiun Sebagai Jaminan Hari Tua. *Junal Sahmiyya*, 3(1). 69.
- Hajam, A. M. (2020). Pengaruh Sikap Menabung dan Orientasi Masa Depan Terhadap Perencanaan Dana Pensiun Pada Pekerja Swasta di Kota Surabaya. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 9(2). 138.
- Cahyono, P. A. J., Yazid, M. (2023). Dana Pensiun Syariah. *Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(4). 1812.
- Indriyani, I. R. (2024). Pengelolaan Dana Pensiun Yang Efektif dan Efisien dalam Menjamin Kesejahteraan Keuangan di Masa Tua. *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 3(3). 183.
- Prabowo, I. S., & dkk. (2024). Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Perencanaan Dana Pensiun dengan Keputusan Investasi Sebagai Variabel Mediasi pada Guru PNS SD di Kabupaten Magetan. *Economics & Education Journal*, 6(2). 390-391.
- Wang, P. (2023). Pengaruh Literasi Keuangan, Pengelolaan Keuangan, dan Sikap Keuangan Terhadap Perencanaan Dana Pensiun Masyarakat Kota Batam. *Junal Akuntansi Unesa*, 11(3). 282.

- Suharto, S., & Prasetyo, H. A. (2022). Persiapan Dana Pensiun : Program Pelatihan dan Pendampingan Berkelanjutan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Anggota Koperasi Garudayaksa di Jakarta Selatan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(11).
- Gammar, N. (2019). Implementasi Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Studi Kasus MTS Darul Khoir Masing, Kec. Batul, Kab. Banggai, Sulawesi Tengah. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 7(1). 15
- Suningsih, & dkk, (2022). Konsep Pembiayaan Pendidikan Dalam Persepektif Islam. *UNISAN JOURNAL: Jurnal Manajemen & Pendidikan Islam*, 1(4). 145-146.
- Afifah, A., & Aprison, W. (2024). Inovasi Pembiayaan Pendidikan Islam Di Era Digital. *Jurnal Kajian Agama Islam*, 8(12). 212
- Fiandi, A, Junaidi. (2022). Sumber-sumber Dana Pendidikan. *Jurnal Basicedu*, 6(6). 4
- Ridwan, A., & Sakdiyah, H. (2022). Analisis Sumber Dana Pendidikan Yayasan Perguruan Islam Al-Kautsar Kecamatan Medan Bogor. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Keislaman*, 4(1). 21-23.
- Khafidhoh, & dkk, (2024). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Islam. *Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam*, 1(4). 186.
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2018). *Himpunan Fatwa Syariah di Bidang Keuangan dan Ekonomi*. Jakarta: DSN-MUI.